



Rencana Kerja **RENJA**

2025

BAPPEDA AGAM

Jl. Sudirman Padang Baru Lubuk Basung 26415

Telpn / Fax (0752) 8701497

email : bappeda.agam@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 1 Lubuk Basung Telp. (0752) 8701497 email:
bappeda.agam@gmail.com Website: <https://bappeda.agamkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN,

- Menimbang : 1. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), perlu disusun Rencana Kerja OPD yang sistematis dan akuntabel;
2. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk sebuah Tim Penyusun Rencana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
6. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025;
 2. Menyusun dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja Badan

2025:

3. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025:
4. Menyusun dokumen rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal
KEPALA BADAN,



RAHMAD LASMONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN
ANGGARAN 2025**

NO	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Rahmad Lasmono.AP, S.Sos, M.AP	Penanggung Jawab
2	Meilinda, ST.M.Si	Ketua
3	Dian Ayu Kurniaty, SE	Sekretaris
4	Andri, ST.MT	Anggota
5	Elsi, SKM.M.Kes	Anggota
6	Shinta Ariani, S.Si.T, MPH	Anggota
7	Jasniwati, S.Sos	Anggota
8	Liza Sandra Dewi, SE. M.Si	Anggota
9	Haris Fadila, SE. M.Si	Anggota
10	Indra Ghandi, ST.M.Si	Anggota
11	Fera Maslinda, SE	Anggota
12	Abdul Ghafur, ST	Anggota
13	Atriswan, ST	Anggota
14	Sefriameli, SE. MM	Anggota
15	Linda Sofyan, AMKL	Anggota

KEPALA,



RAHMAD LASMONO

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPDA) Kabupaten Agam dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dokumen ini berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappeda Tahun 2025 ini telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sekaligus sebagai dasar mengukur tingkat keberhasilan Bappeda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bappeda Kabupaten Agam dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi.

Lubuk Basung, Juni 2025
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN AGAM,


Ratnadi Lasmono AP,S.Sos.M.AP
Pemula Utama Muda
NIP. 197410251994031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Grafik dan Tabel	iii
BAB.1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
BAB.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	44
3.2. Tujuan dan sasaran Renja	45
3.3. Program dan Kegiatan	46
BAB.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	49
BAB.5 Penutup	54
5.1. Kaidah – kaidah pelaksanaan	54
5.2. Rencana tindak lanjut	54

DAFTAR TABEL

Tabel .2.1	Pencapaian Sasaran Strategis Renstra 2021-2026	15
Tabel .2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel .2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan (T.C.29) Pencapaian Renstra OPD.....	18
Tabel T.C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda	29
Tabel T.C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024....	35
Tabel .3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda	45
Tabel T - C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Agam yaitu “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

Sebagai penjabaran dari Dokumen RKPD, Renstra OPD dan RPJMD, Renja OPD disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD).

Penyusunan Renja OPD dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu sesuai dengan Renstra OPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
7. Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Agam No. Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen

perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Bappeda, Proses Penyusunan Renja Bappeda, Keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD, Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan membandingkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pada Tahun Anggaran 2023, Bappeda melaksanakan 4 (empat) program, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan anggaran Rp. 4,401.119.828,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.899.707.092,- atau sebesar 88,61%.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan, 13 sub kegiatan dan merupakan kegiatan pendukung operasional rutin Bappeda Kabupaten Agam. Program ini mendukung semua kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.106.345.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 666.957.994,- atau sebesar 60,28%.

Dengan Indikator program Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan,

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) *Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*

Indikator kinerja yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah terselenggaranya tahapan penyusunan perencanaan daerah dalam bentuk;

- a. Fasilitasi tim pendamping Kabupaten pada pelaksanaan musrenbang kecamatan.
- b. Terselenggaranya konsultasi publik.
- c. Pelaksanaan Forum SKPD.
- d. Pelaksanaan Murenbang Kabupaten, dan
- e. Penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu; RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2023.

Hasil yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Terlaksana tahapan perencanaan Tahun 2024 berupa :
 - a. Konsultasi publik Ranwal RKPD 2024,
 - b. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
 - c. Forum Lintas OPD
 - d. Musrenbang Kabupaten
- 2) Tersusunnya Dokumen RKPD tahun 2024;
- 3) Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026;
- 4) Tersusunnya Dokumen KUA 2024;
- 5) Tersusunnya Dokumen PPAS 2024;
- 6) Tersusunnya Dokumen KUPA 2023;
- 7) Tersusunnya Dokumen PPAS-P 2023.
- 8) Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kalender Kegiatan Pokok Pemerintah Daerah Tahun 2024

2) *Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan*

Adapun bentuk kegiatan dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK ke lapangan
- b) Melakukan rapat-rapat koordinasi kegiatan DAK
- c) Menyusun laporan DAK Triwulan I, II, III dan IV, sebanyak 4 jenis laporan.
- d) Koordinasi laporan dana TP Triwulan I, II, III dan IV di aplikasi e-monev Bappenas
- e) Mengusulkan kegiatan DAK tahun 2024 ke aplikasi Krisna Bappenas

f) Membuat laporan capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 triwulan I, II, III dan IV

3) *Analisis data dan informasi Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini merupakan bentuk layanan pemerintah dalam penyediaan data dan informasi tentang statistik daerah yang merupakan data-data dasar dalam bentuk angka-angka maupun grafis yang dibutuhkan oleh SKPD ataupun instansi dan lembaga lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan telah dicapai. Hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan penyelenggaraan forum satu data Tahun 2023.

3. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 291.997.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 253.532.205,- atau 86.83 %.

Indikator programnya adalah Persentase keselarasan perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah .

Kegiatan Bidang Sosial yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembuatan Dokumen Penanganan Bencana Tahun 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Penyusunan Peraturan Bupati terkait bantuan sosial di Dinas Sosial;
3. Pengampu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait data penerima bantuan sosial di Dinas Sosial;
4. Koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;
5. Koordinasi persiapan Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
6. Penyusunan Peraturan Bupati terkait Nagari di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;

7. Persiapan dan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
8. Koordinasi pelaksanaan Pilwana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
9. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
10. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Penyusunan buku data perspektif gender Kabupaten Agam tahun 2023 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Koordinasi pengumpulan data PUG dengan OPD terkait penginputan pada aplikasi;
13. Koordinasi kegiatan prioritas nasional terkait stunting di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Pelaksanaan kegiatan Kampung KB di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kegiatan Alat Permainan Edukatif (APE) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Pelaksanaan kegiatan Duta Gendre tahun 2023 di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Koordinasi kegiatan prioritas nasional terkait stunting di Dinas Kesehatan;
18. Koordinasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Dinas Kesehatan;
19. Koordinasi terkait kepesertaan Jamkesda di Dinas Kesehatan;

20. Koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kesehatan;
21. Koordinasi terkait Kampung Inggris di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Penyiapan data beasiswa agam maju di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Koordinasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Pelaksanaan FGD program prioritas terkait kepariwisataan (masjid sirah, kereta gantung dan taman safari) dalam rangka persiapan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
25. Pelaksanaan kegiatan tahunan Festival Danau Maninjau di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
26. Koordinasi terkait dana hibah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
27. Koordinasi pelaksanaan beasiswa agam maju di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
28. Koordinasi terkait data imam garin, rumah tahfis dan guru TPA MDA di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
29. Kegiatan Safari Ramadhan di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
30. Kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Agam tahun 2023 di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
31. Penyusunan Keputusan Bupati Agam terkait Data P3KE Kabupaten Agam;
32. Tindak lanjut monitoring verifikasi dan validasi data P3KE ke Nagari-nagari.

kegiatan pada lingkup tata ruang dan lingkungan hidup antara lain:

1. Penyusunan RDTR dan KLHS RDTR Perkotaan Banuhampu Tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Agam;

2. Penyusunan RDTR dan KLHS Perkotaan Palembang Tahun 2023 di Kementerian ATR/BPN;
3. Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2025-2045 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;
4. Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Evaluasi DAK 2023;
5. Koordinasi Program Prioritas Penyelamatan Danau Maninjau;
6. Penyusunan Formulir Kerangka Acuan Rencana Kawasan Objek Wisata Bandar Mutiara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;
7. Penyusunan Formulir Kerangka Acuan Revitalisasi Danau Maninjau dan DAS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;
8. Fasilitasi Rencana Tata Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian ATR/BPN;
9. Koordinasi Pembahasan Penyusunan DED dan Penataan TPA Regional Payakumbuh di BPPW Sumatera Barat;
10. Penyusunan Fisability Study (FS) TPA Palupuh di Dinas Lingkungan Hidup;
11. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;
12. Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;
13. Penyusunan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan The Axana Hotel di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam;
14. Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Geopark Nasional Ngarai Sianok Maninjau di Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
15. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Eks-Lapangan Terbang Gadut di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam.
16. Pelaksanaan Konsultasi Publik Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Maninjau Tahun 2023 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

kegiatan pada lingkup ekonomi antara lain:

1. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

2. Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Evaluasi DAK 2023;
3. Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Agam;
4. Koordinasi Persiapan Penataan dan Registrasi Kepemilikan KJA oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam;
5. Koordinasi Kajian Branding Kawasan Agam Park dan Perencanaan Pembangunan Pembibitan dan Penggemukan Ternak di Pasia Laweh di Dinas Pertanian Kabupaten Agam.

Beberapa kebijakan dan program pengendalian inflasi yang dilakukan adalah :

1. Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail;
2. Meningkatkan sinergitas dan kerja sama antar daerah (KAD) dan keterlibatan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda);
3. Menggalakkan gerakan menanam cabai merah, cabai hijau dan bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya pada level rumah tangga;
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah;
5. Mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan bidang pekerjaan umum dan tata ruang antara lain:

1. Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Agam Tahun 2023-2027 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;
2. Lanjutan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;
3. Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkup Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Evaluasi DAK 2023;
4. Koordinasi kegiatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Agam;

5. Penyusunan Dokumen RP2KPKPK di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam;
6. Koordinasi Rencana Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tapian Kualo Nagari Sungai Batang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Agam;
7. Koordinasi Kegiatan Strategis Infrastruktur Dana APBN 2024-2025 dan Rencana Tahun Anggaran 2024-2025 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
8. Pelaksanaan Kegiatan Hibah Air Minum Pedesaan Tahun 2023 selaku *Project Implementation Unit* (PIU) dengan OPD Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;
9. Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat (ALS) TA 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;
10. Koordinasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Prioritas Stunting;
11. Penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Agam di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam;
12. Fasilitasi program Pamsimas/SPAM Berbasis Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Agam;
13. Penyusunan Master Plan Kawasan Objek Wisata Bandar Mutiara di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;
14. Pelaksanaan FGD II SPAM Regional Agam-Bukittinggi skema KPBU Unsolicited (calon pemrakarsa) PT. Nindya Karya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Rencana Pembuatan Aplikasi Pendataan Sanitasi Kabupaten Agam di Bappeda Kabupaten Agam;
Koordinasi Tindak Lanjut Pembangunan Taman Safari Nagari Canduang Koto Laweh di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 459.353.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 333.500.050,- atau 72.60%.

Indikator programnya adalah Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk Perumusan

Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan asistensi dalam rangka membuat dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.
2. Pelaksanaan kajian Perhitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Agam Tahun 2023;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD terkait dan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
4. Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
5. Pengumpulan proposal inovasi OPD
6. Terselenggaranya asistensi inovasi pada tanggal 23 Juni s/d 7 Juli 2023
7. Penginputan data Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah pada tanggal 01 s/d 25 Juli 2023
8. Terdapat 45 inovasi yang sudah diinput dalam aplikasi indeks inovasi daerah.
9. Terdapat 25 inovasi dengan kategori sangat inovatif yang dikirim melalui aplikasi indeks inovasi daerah kementerian dalam negeri.
10. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Inovasi Daerah.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diatas menggambarkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan daerah, sesuai dengan target kinerja Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Sasaran Strategis Renstra 2021-2026

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	100 %	100 %	100 %	Baik
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang di laksanakan	100 %	100%	100%	Baik
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,5%	81,60%	97,72 %	cukup
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase hasil kelitbangan yang di jadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100 %	100%	100%	Baik
		3.1	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit)	45 %	59 %	131 %	Sangat Baik

Dari tabel 2.1 capaian Bappeda Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Secara keseluruhan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra cukup baik. Terdapat 1 (satu) capaian indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Hal ini sesuai dengan penilaian tim APIP Daerah no. 7001.2.1/63/ITDA-2024 Tanggal : 20 Maret 2024, dan hasil rekomendasi telah di tindak lanjuti.

Kriteria penilaian tersebut sesuai dengan skala nilai peringkat kinerja pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang mencapai target yaitu :

1. Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah dengan capaian 100%, hal ini dicapai karena upaya pengawalan terhadap proses penyusunan perencanaan dan ketentuan regulasi yang mengharuskan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
2. Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan capaian 100 %, hal ini dicapai karena upaya yang ketat dalam pelaksanaan tahapan perencanaan yang sesuai dengan kalender perencanaan.
3. Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan dengan capaian 100%, hal ini di capai atas kerjasama dengan tim lembaga penelitian ekonomi regional fekon universitas andalas dengan kajian perhitungan nilai tukar petani.
4. Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja) dengan capaian 131 %, hal ini di capai dengan memaksimalkan koordinasi inovasi dan menumbuhkembangkan inovasi OPD hingga setiap OPD dapt memiliki minimal 1 inovasi

Selanjutnya, rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023 Renstra Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 (T.C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023
Bappeda Kabupaten Agam**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	90%	100%	90%	100%	100%	90 %	100%	100%
	<i>Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda</i>	90%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	30 orang	100%	30 orang	100%	100%	30 orang	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium pengelola keuangan</i>	10 Bulan 14 Bulan	100%	10 Bulan 14 Bulan	100%	100%	10 Bulan 14 Bulan	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14 laporan	100%	14 laporan	100%	100%	14 laporan	100%	100%
	<i>Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	90%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	100%	1 paket	100%	100%	1 paket	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	100%	1 paket	100%	100%	1 paket	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	100%	2 paket	100%	100%	2 paket	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100%	12 laporan	100%	100%	12 laporan	100%	100%
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	90%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang di sediakan</i>	2 unit	100%	2 unit	100%	100%	2 unit	100%	100%
	<i>Pengadaan Peralatan mesin lainnya</i>	<i>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan</i>	14 unit	100%	14 unit	100%	100%	14 unit	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 unit	100%	1 unit	100%	100%	1 unit	100%	100%
	<i>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	85%	100 %	85 %	100%	100%	85%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air,</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,	38 laporan	100%	38 laporan	100%	100%	38 laporan	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>dan listrik</i>	Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan								
	<i>Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	100%	12 laporan	100%	100%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	85%	100%	85%	100%	100%	85%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	100%	9 unit	100%	100%	9 unit	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	21 unit	100%	21 unit	100%	100%	21 unit	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 bulan 1 unit 3 orang/bulan	100%	12 bulan 1 unit 3 orang/bulan	100%	100%	12 bulan 1 unit 3 orang/bulan	100%	100%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/kota</i>	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 dok	100%	7 dok	100%	100%	7 dok	100%	100%
	<i>Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan</i>	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (SP2D, ADA, KADA,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SUSENAS, Indeks makro daerah)								
	<i>Sub Kegiatan Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan</i>	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	4 dok	100%	4 dok	100%	100%	4 dok	100%	100%
	<i>Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan</i>	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan</i>	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	8 laporan	100%	8 laporan	100%	100%	8 laporan	100%	100%
	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dok	100%	10 dok	100%	100%	10 dok	100%	100%
	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan koordinasi</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dok	100%	4 dok	100%	100%	4 dok	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan</i>	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 laporan	100%	3 laporan	100%	100%	3 laporan	100%	100%
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum</i>	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	3 laporan	100%	3 laporan	100%	100%	3 laporan	100%	100%
	<i>Pengembangan</i>	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<i>Inovasi dan Teknologi</i>	terfasilitasinya pengembangan Inovasi OPD								
	<i>Sub Kegiatan Disminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif</i>	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	3 laporan	100%	3 laporan	100%	100%	3 laporan	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Agam

Pelaksanaan fungsi Bappeda Kabupaten Agam dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang dibidang Penelitian dan Pengembangan, dilakukan dengan mempersiapkan rumusan kebijakan teknis, dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan Litbang daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Agam maupun dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.

Berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja Bappeda, dilakukan dalam bentuk pemberian informasi dan pemikiran strategis dibidang perencanaan pembangunan dan Litbang daerah, yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur,
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan daerah;
6. Melaksanakan fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 Bappeda Kabupaten Agam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026, sehingga penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Agam Tahun

2021-2026. Sehingga pengukuran kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Selengkapnya terdapat pada Tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel T - C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda
Kabupaten Agam

No	Sasaran	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan.		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah		√	-	83,5	84,5	85,5	-	80,60	83,5	85,5	
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang di jadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan		√	100	100	100	100	-	100	100	100	
		Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)		√	38	45	53	61	47	59	62	64	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal maupun dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Kewajiban mengakomodir regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan, yang menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
- b. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
- c. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.
- f. Reformasi birokrasi belum terlaksana secara maksimal.
- g. Masih terbatasnya pengkajian dan penelitian dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Diperlukan koordinasi intensif dengan seluruh OPD, untuk menjaga konsistensi dalam penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran.

2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan mengatasi dampak inflasi perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan kebijakan ekonomi daerah dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan pangan.
3. Penyamaan persepsi dengan OPD terkait terhadap pentingnya kebutuhan data dan informasi yang dilakukan secara benjenjang untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi.
4. Aparatur Bappeda dituntut memiliki kapasitas yang memadai untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan dan dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang cukup dinamis.
5. Pemahaman masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunamn terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan zaman, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
6. Peningkatan dukungan dan komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal, mutlak dibutuhkan mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan yang di hadapi.

Selanjutnya, peluang Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5. Pemanfaatan secara tepat terhadap kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Analisis terhadap permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Tahun 2021-2026, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Memastikan sinkronisasi kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan

bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).

3. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
4. Implementasi perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat,

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah **“Pembangunan berkelanjutan melalui penguatan sektor ekonomi basis, meningkatkan daya saing & sumber daya manusia ”**.

Dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025:

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola Pemerintahan Nagari
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha untuk memperkuat ketahanan pangan.
3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro
4. Peningkatan kepariwisataan melalui Amenitas, atraksi dan aksesibilitas
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.
6. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda.
7. Penguatan gerakan Nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau.

Berpedoman pada fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Tujuan Misi 1 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari yang efektif, efisien dan melayani”** dengan sasaran ke-1 yaitu **“Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel”**. Sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator perencanaan daerah, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025.

Selanjutnya, perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2025, sebagaimana tabel 2.5. dibawah ini.

TABEL 2.5 Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.273.754.979	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.383.655.600
PERENCANAAN				4.593.851.579	PERENCANAAN					6.405.040.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	95 persen	4.269.876.279	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	95%	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	4.505.040.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	95%	3.122.175.369	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah		95%	Terpenuhinya kebutuhan gaji	3.045.040.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.083.725.369	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	Terbayarkannya gaji 30 orang	3.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	38.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan	45.040.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	95%	574.274.810	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD		95%	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja	630.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi	- Kab. Agam, Lubuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	9.551.513	Penyediaan Komponen Instalasi	- Kab. Agam,	Persentase pemenuhan	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	Terpenuhinya paket	10.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Basung, Lubuk Basung	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Lubuk Basung, Lubuk Basung	kebutuhan dasar operasional kerja SKPD unit	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		komponen Instalasi listrik	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.540.897	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kerja SKPD unit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	90.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.305.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kerja SKPD unit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Terpenuhinya paket barang cetak dan penggandaan	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	448.877.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kerja SKPD unit	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Tersedianya laporan penyelenggaraan rapat	500.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	95%	76.656.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan		95%	Terpenuhinya barang milik daerah sesuai perencanaan	320.000.000
Pengadaan Mebel	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	26.620.000	Pengadaan Mebel	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Tersedianya paket mebel	60.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	42.036.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	250.000.000

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	418.319.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		95%	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan	450.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38 Laporan	52.965.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38 Laporan	Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	365.354.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	380.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	95%	78.450.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik		95%	Terpenuhinya barang milik daerah yang berkondisi baik	60.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	53.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Terpenuhinya kendaraan yang di bayarkan pajaknya	60.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	24.970.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	0,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 persen	31.605.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah		100%	Terpenuhinya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.580.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	100%	0,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah		100%	Terpenuhinya kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	1.500.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	0,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota	1.500.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	-	31.605.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi		-	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah yang dievaluasi	80.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	31.605.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Tersedianya laporan hasil evaluasi	80.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja)	100 persen	292.370.300	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja)		100%	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan	320.000.000

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	100%	180.091.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah		100%	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan	190.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	11 Dokumen	180.091.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	11 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan daerah bidang Pembangunan manusia	190.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayah dengan dokumen daerah	100%	112.278.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayah dengan dokumen daerah		100%	Tersedianya dokumen perencanaan OPD	130.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	112.278.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayah dengan dokumen daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan OPD	130.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.679.903.400	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.978.615.600

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	100 Persen	1.679.903.400	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1.978.615.600
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	1.596.254.900	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		3 Laporan	Terpenuhinya penelitian dan pengembangan	1.858.615.600
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	278.615.600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan	358.615.600
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	5 Rekomendasi	1.317.639.300	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	5 Rekomendasi	Terpenuhinya jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru	1.500.000.000

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100%	83.648.500	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi		100%	Terpenuhinya OPD yang difasilitasi	120.000.000
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	83.648.500	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	Terpenuhinya dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan	120.000.000
		TOTAL		6.273.754.979							8.383.655.600

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun dari para pemangku kepentingan.

Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Proses perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, sebagai berikut :

1. TEMA PEMBANGUNAN:

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

2. PRIORITAS NASIONAL:

a. PRIORITAS 1:

Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.

b. PRIORITAS 2:

Infrastruktur berkualitas yang di arahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.

c. PRIORITAS 3:

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Kabupaten Agam Tahun 2025, Renja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2025 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1. persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	100
		2. persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	85.5
3.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1. persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	100

No	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target
		2. persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	%	61

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah membawa implikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, OPD, organisasi profesi, dan sektor swasta serta lembaga masyarakat lainnya;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya Forum OPD dan Musrenbang;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Menyusun RPJMD tahun 2025-2029.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, serta sasaran pembangunan urusan perencanaan pembangunan yang telah dikemukakan diatas, maka program/kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - a. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan
 - b. Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- 2) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
 - a. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
 - b. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 3) Program penelitian dan pengembangan daerah

- a. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
 - b. Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi.
- 4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
- a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - b. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, pada Tahun Anggaran 2025, Bappeda akan melaksanakan kegiatan sebagaimana rumusan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Bappeda Kabupaten Agam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026															
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)														
								Tolok Ukur															
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	0 1			PERENCANAAN					6.405.040.000														
5	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN				4.593.851.579									95%	4.269.876.279			95%	4.505.040.000
5	0 1	0 1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	95%	3.122.175.369											3.045.040.000				
5	0 1	0 1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	30 orang/bulan	3.083.725.369	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 orang/bulan	3.000.000.000										
5	0 1	0 1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	14 Laporan	38.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	45.040.000										
5	0 1	0 1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	95%	574.274.810			95%	630.000.000										
5	0 1	0 1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	1 Paket	9.551.513	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000										
5	0 1	0 1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	1 Paket	88.540.897	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	90.000.000										
5	0 1	0 1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan operasional dan pengadaan yang di sediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	2 Paket	27.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	30.000.000										
5	0 1	0 1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	12 Laporan	448.877.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	500.000.000										
5	0 1	0 1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	95%	76.656.500			95%	320.000.000										
5	0 1	0 1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	2 Unit	26.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	60.000.000										
5	0 1	0 1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	5 Unit	42.036.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	250.000.000										
5	0 1	0 1	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000										
5	0 1	0 1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	95%	418.319.600			95%	450.000.000										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	0	0	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	38 Laporan	52.965.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38 Laporan	70.000.000	
5	0	0	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	12 Laporan	365.354.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	380.000.000	
5	0	0	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang Berkondisi baik	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	95%	78.450.000		95%	60.000.000	
5	0	0	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	9 Unit	53.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Unit	60.000.000	
5	0	0	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	21 Unit	24.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Unit	0,00	
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah		100 persen	31.605.000		100%	1.580.000.000	
5	0	0	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	100 persen	0,00		100%	1.500.000.000	
5	0	0	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RRJP/ RPJMD /RKPD)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	5 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	1.500.000.000	
5	0	0	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	-	31.605.000		100%	80.000.000	
5	0	0	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	4 Laporan	31.605.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8 Laporan	80.000.000	
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renja dan Renstra)		100 persen	292.370.300		100%	320.000.000	
5	0	0	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	100%	180.091.500		100%	190.000.000	
5	0	0	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	11 Dokumen	180.091.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Dokumen	190.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Tolok Ukur	
5 0 1 3 2,03	RPJMD dan RKPD) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	100%	112.278.800			100%	130.000.000
5 0 1 3 2,03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen daerah	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	3 Dokumen	112.278.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	130.000.000	
5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.679.903.400			1.978.615.600	
5 0 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja		100 persen	1.679.903.400			100%	1.978.615.600
5 0 5 2 2,01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	3 Laporan	1.596.254.900		3 Laporan	1.858.615.600	
5 0 5 2 2,01	02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	3 Laporan	278.615.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Laporan	358.615.600	
5 0 5 2 01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	5 Rekomendasi	1.317.639.300		5 Rekomendasi	1.500.000.000	
5 0 5 2 2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	100%	83.648.500		100%	120.000.000	
5 0 5 2 2,04	01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	3 Dokumen	83.648.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	120.000.000	
TOTAL					6.273.754.979			8.383.655.600	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
3. Renja 2025 di susun selaras dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2021 - 2026 dan selaras dengan RKPD 2025.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala
Bappeda Kab. Agam

Rahmad Lamono, AP, S.sos.M.AP
NIP. 197410251994031002

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Agam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
3. Renja 2025 di susun selaras dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2021 - 2026 dan selaras dengan RKPD 2025.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

